



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT KERJA KOMISI VII DPR-RI**  
**DENGAN**  
**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

---

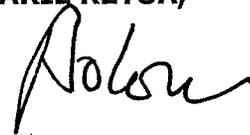
Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 15 Februari 2010  
Pukul : 14.32 – 20.10 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI  
Ketua : Drs. Effendi M.S Simbolon  
Sekretaris : Dra. Dewi Barliana, M.Psi  
Hadir Anggota : 34 dari 53 Anggota Komisi VII DPR-RI  
1 orang ijin  
Hadir Pemerintah : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Acara : "Fungsi Pengawasan"  
1. Pembukaan oleh Pimpinan Komisi VII DPR-RI;  
2. Penjelasan Pemerintah;  
3. Tanya jawab;  
4. Kesimpulan ;  
5. Penutup.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi VII DPR-RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan sinkronisasi kebijakan energi nasional dengan mempertimbangkan target penurunan emisi Indonesia pada COP-15 kopenhagen dengan melakukan pengkajian secara mendalam atas penggunaan energi nuklir, energi baru dan terbarukan lainnya.
2. Komisi VII DPR-RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan perhatian penuh atas komitmen dan realisasi Jaminan Reklamasi dari perusahaan-perusahaan pertambangan.
3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meninjau ulang penetapan tarif multiguna PLN 6600 VA mengacu pada hasil kesimpulan Rapat Kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan komisi VII DPR RI tanggal 3 April 2008 dan kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan pemerintah cq. Menteri Keuangan RI pada tanggal 20 Agustus – 17 September 2009.
4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menuntaskan sejumlah permasalahan pada blok Migas yang masih tertunda dan belum terselesaikan antara lain : blok gas natuna D-Alpha, struktur bisnis Donggi Senoro, manajemen keamanan kilang (safety management), penertiban manajemen aset Arun dan Bontang, penertiban kontrak-kontrak Migas.

5. Komisi VII DPR-RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan rasio inspektur tambang, dana pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengoperasian Izin Usaha Pertambangan yang berjumlah besar.
6. Komisi VII DPR-RI meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perizinan pinjam pakai PKP2B di wilayah hutan diantaranya PT. Jorong Barotama Gristone di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
7. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengawasi pelaksanaan pengalihan saham di PT. Freeport Indonesia ex saham PT. Indocopper Investama sebesar 9,36 % kepada Pemerintah Daerah cq. masyarakat Papua.
8. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menuntaskan masalah pengalihan pelanggan Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwomego di Provinsi Lampung kepada PT. PLN (Persero).

Jakarta, 15 Februari 2010  
**PIMPINAN KOMISI VII DPR RI**  
**WAKIL KETUA,**



**DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON**